



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN KLIEN PT  
ALIM DATA SOLUSINDO MENGGUNAKAN E-SPT**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
Julia Dwi Fitriani  
1702033028

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN KLIEN PT  
ALIM DATA SOLUSINDO MENGGUNAKAN E-SPT**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
Julia Dwi Fitriani  
1702033028

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020

**PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : **Prosedur Pelaporan SPT PPh Badan Klien PT  
Alim Data Solusindo Menggunakan e-SPT**

**NAMA** : **Julia Dwi Fitriani**

**NIM** : **1702033028**

**PROGRAM STUDI** : **D3 Perpajakan**

**FAKULTAS** : **Ekonomi dan Bisnis**

**TAHUN AKADEMIK** : **2019/2020**

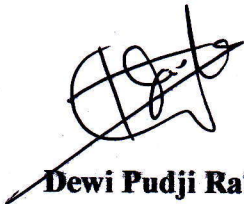
Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 24 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



**Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si**



**Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si**

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PELAPORAN SPT PPH BADAN KLIEN PT ALIM  
DATA SOLUSINDO MENGGUNAKAN E-SPT**

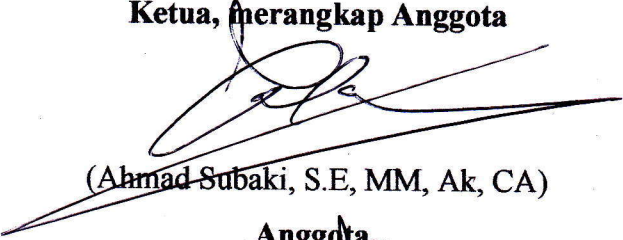
Oleh:

**Nama : Julia Dwi Fitriani**  
**NIM : 1702033028**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 03 September 2020

**Ketua, merangkap Anggota**

  
(Ahmad Subaki, S.E, MM, Ak, CA)

**Anggota**

  
(Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Nuryadi Wijiharjono, S.E, M.M

## KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahim...”

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap hamba-Nya. Dengan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, dengan mengangkat judul **“PROSEDUR PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN KLIEN PT ALIM DATA SOLUSINDO MENGGUNAKAN E-SPT”** sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi Diploma Tiga jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu dan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dan segala kebaikan semoga tetap tercurah kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan yang dibawanya, hingga yaumul akhir nanti, Aamiin. Dan dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua tersayang Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa dan kasih sayang yang tulus untuk penulis dapat merampungkan Laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Atas segala do'a, dukungan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya kepada saya selama penyusunan laporan magang ini.
8. Bapak Suyono, SE, M.Ak, CA selaku pimpinan PT Alim Data Solusindo yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang, saya merasa bahwa banyak sekali pengalaman yang diperoleh.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan tugas akhir sehingga laporan ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari, bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu dan kemampuan. Untuk itu penulis mengharapkan tanggapan, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk penulis, serta pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Jakarta, 24 Agustus 2020

Penulis,



Julia Dwi Fitriani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	8
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	9
1.4 Metode Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
2.1 Prosedur dan Pelaporan.....	12
2.2 Perpajakan.....	12
2.2.1 Pengertian Pajak.....	12
2.2.2 Fungsi Pajak.....	13
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak.....	15
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.2.5 Tarif Pajak.....	18
2.2.6 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak.....	20
2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	20
2.3 Pajak Penghasilan.....	21
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	21

2.3.2	<i>Dasar Hukum Pajak Penghasilan</i> .....	21
2.3.3	<i>Subjek Pajak Penghasilan</i> .....	22
2.3.4	<i>Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan</i> .....	24
2.3.5	<i>Objek Pajak Penghasilan</i> .....	25
2.3.6	<i>Tarif Pajak Penghasilan</i> .....	26
2.4	<b>Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</b> .....	28
2.4.1	<i>Dasar Hukum</i> .....	28
2.4.2	<i>Subjek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</i> .....	29
2.4.3	<i>Objek Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</i> .....	30
2.4.4	<i>Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</i> .....	32
2.4.5	<i>Jangka Waktu Pengenaan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</i> .....	33
2.4.6	<i>Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu</i> .....	33
2.5	<b>Surat Pemberitahuan (SPT)</b> .....	34
2.5.1	<i>Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)</i> .....	34
2.5.2	<i>Dasar Hukum</i> .....	35
2.5.3	<i>Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)</i> .....	36
2.5.4	<i>Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)</i> .....	39
2.6	<b>Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)</b> .....	40
2.6.1	<i>Pengertian Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)</i> .....	40
2.6.2	<i>Dasar Hukum</i> .....	40
2.6.3	<i>Aplikasi e-SPT</i> .....	40
2.6.4	<i>Electronic Filing (e-Filing)</i> .....	41
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....		44
3.1	<b>Gambaran Umum PT Alim Data Solusindo</b> .....	44
3.1.1	<i>Sejarah Singkat Perusahaan</i> .....	44
3.1.2	<i>Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan</i> .....	44
3.1.3	<i>Visi dan Misi</i> .....	45
3.1.4	<i>Struktur Organisasi</i> .....	46



3.2 Dokumen/Data Klien.....	47
3.2.1 Identitas Klien.....	47
3.2.2 Susunan Pengurus dan Komisaris .....	48
3.2.3 Pemegang Saham.....	49
3.3 Pembahasan .....	50
3.3.1 Prosedur Perhitungan dan Memperhitungkan PPh Badan 1771.....	50
3.3.2 Prosedur Menyetor dan Melaporkan SPT PPh Badan 1771..	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran-saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>

## **LAMPIRA**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Penerimaan Pajak Tahun 2019 (dalam triliun rupiah)	2
1.2	Daftar Jumlah Peredaran Bruto PT Maritim Persada Mulia Tahun 2019	5
2.1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	15
2.2	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	20
2.3	Tarif Pajak Penghasilan Badan	21
3.1	Data Susunan Pengurus & Komisaris	37
3.2	Data Pemegang Saham	38

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Struktur Organisasi PT Alim Data Solusindo	35
2	Neraca PT Maritim Persada Mulia	38
3	Laporan Laba/Rugi PT Maritim Persada Mulia	39
4	Rekonsiliasi Fiskal PT Maritim Persada Mulia	40
5	Angsuran PPh Pasal 25 PT Maritim Persada Mulia	41
6	Penyusutan Aktiva Tetap PT Maritim Persada Mulia	42
7	Tampilan e-SPT	43

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Formulir Pengajuan Judul	1/18
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/18
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	3/18
4	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/18
5	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Induk	5/18
6	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir I	6/18
7	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir II	7/18
8	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir III	8/18
9	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir IV	9/18
10	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir V	10/18
11	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Formulir VI	11/18
12	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	12/18
13	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Lampiran Khusus Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	13/18
14	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri	14/18
15	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Lampiran Khusus Daftar Fasilitas Penanaman Modal	15/18
16	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Lampiran Khusus Daftar Cabang Utama Perusahaan	16/18
17	Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan	17/18
18	Daftar Riwayat Hidup	18/18

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam membiayai pembangunan dalam suatu negara diperlukan pengeluaran yang tidak sedikit. Pembiayaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan salah satu sumber terbesar berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Adriani dalam Pandiangan (2014)

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2019 mencapai 1.786,4 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.577,5 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar 208,8 triliun. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perbaikan dan penambahan layanan publik.

Pentingnya pajak dalam perekonomian negara telah mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Dimulai dari reformasi perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, reformasi sistem administrasi perpajakan serta peningkatan sumber daya manusia. Tujuan dari reformasi perpajakan yaitu untuk lebih menegakkan kemandirian bangsa dengan menjadikan penerimaan pajak sebagai pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara Indonesia.

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perubahan sistem pemungutan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak sehingga tercapai kemandirian keuangan negara melalui pajak.

Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa (Boedijono dkk, 2019). Di Indonesia, pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah, di mana pemungutan masing-masing diserahkan kepada instansi yang berwenang (Prakoso dkk, 2019). Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi

maupun kabupaten/kota seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Roko, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan lain sebagainya yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2019 (dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2019	Realisasi s/d 31 Des 2019		
			$\Delta$ % 2018 -2019	% thd Target
Pajak Penghasilan	931,84	894,4	16,19%	87,88%
- Non Migas OP	361,04	387,6	28,57%	169,64%
- Non Migas Badan	570,80	440,6	15,14%	84,06%
PPN dan PPnNM	659,00	655,4	11,96%	99,34%
PBB dan Pajak Lainnya	28,5	27,7	11,61%	96,971%
<b>Jumlah</b>	<b>1.619,3</b>	<b>1.577,5</b>	<b>15,44%</b>	<b>92,41%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Menteri Keuangan Januari 2020

Berdasarkan data diatas, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 paling tinggi di peroleh yaitu dari pajak penghasilan yang mencapai 894,4 triliun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pengertian Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4 ayat (2) dan lain sebagainya.

Menurut penelitian Wicaksono dkk (2019), kendala dalam persyaratan administrasi, perbedaan pemahaman peraturan, serta kendala dalam perpajakan merupakan hal yang bisa ditemui dalam pengelolaan keuangan.

Pada Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai target dari APBN meski dalam tahun berjalan terdapat pengurangan penerimaan potensial dari pemberian fasilitas perpajakan, terutama penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenai pajak bersifat final berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf e berbunyi penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah serta program percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% kini telah diturunkan menjadi tarif 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan peraturan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto antara Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

PT Alim Data Solusindo merupakan nama badan usaha yang bergerak dibidang jasa akunting yang bertempat di Ruko Cibubur Village Apartemen Jl. Radar Auri No.1 RT/RW 008/014 Cibubur No.KE 01-03 Jakarta Timur. PT Alim Data Solusindo menangani seluruh bidang usaha jasa, perdagangan, dain industri yang membutuhkan jasa dalam menangani problematika akuntansi keuangan, dan perpajakan.



PT Maritim Persada Mulia merupakan salah satu klien PT Alim Data Solusindo yang bergerak di bidang industri karpet yang bertempat di Permadani Permai Blok M No.13, Pasar Minggu. Dalam satu tahun menjalankan kegiatan usaha, PT Maritim Persada Mulia mendapatkan jumlah peredaran bruto atau omzet sebesar Rp24.200.000.000,00 yang diperoleh dari kegiatan industri karpet. Diketahui PT Maritim Persada Mulia memperoleh jumlah peredaran bruto atau omzet selama tahun 2019 di atas Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga PT Maritim Persada Mulia merupakan subjek pajak penghasilan tertentu lainnya berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf e berkewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berikut Tabel Daftar Jumlah Peredaran Bruto PT Maritim Persada Mulia selama tahun 2019.

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Peredaran Bruto PT Maritim Persada Mulia Tahun

No	Bulan	2019	Penerimaan Bruto / Mozet
1	Januari		Rp 396.643.217,0
2	Februari		Rp 496.123.472,0
3	Maret		Rp 997.425.169,0
4	April		Rp 1.116.666.667,0
5	Mei		Rp 2.024.362.193,0
6	Juni		Rp 3.025.321.836,0
7	Juli		Rp 2.016.666.667,0
8	Agustus		Rp 1.824.362.202,0
9	September		Rp 3.536.974.261,0
10	Oktober		Rp 2.224.362.182,0
11	November		Rp 2.904.327.853,0
12	Desember		Rp 3.636.764.281,0
Jumlah Omzet Tahun 2019			Rp 24.200.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT Maritim Persada Mulia

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan sistem informatika dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan pelayanan pajak secara online yang disebut *e-Tax* yang merupakan sarana pelayanan perpajakan yang disediakan DJP secara elektronik bertujuan untuk memudahkan pelayanan perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak (*e-Registration*, *e-NPWP*), membayar pajak (*e-Billing*, *e-Payment*), hingga melaporkan pajak (*e-SPT*, *e-Filing*). Pelaporan pajak baik Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, kini dapat melalui *e-SPT* atau Surat Pemberitahuan Elektronik yang merupakan data SPT berbentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak menggunakan aplikasi *e-SPT*. Aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan wajib pajak untuk membuat *e-SPT*. Hal

tersebut memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara *online*, termasuk PT Maritim Persada Mulia.

Aplikasi e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan merupakan aplikasi berbasis komputer dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibuat tahun 2015 untuk wajib pajak badan dalam mempermudah membuat dan melaporkan e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771. Selama ini PT Maritim Persada Mulia melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 1771 secara manual. Sehingga Pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan badan tahun 2019, PT Maritim Persada Mulia baru akan memanfaatkan aplikasi e-SPT dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Tugas Akhir tentang **“Prosedur Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Klien PT Alim Data Solusindo Menggunakan E-SPT”**.

## **1.2 Permasalahan**

Dalam suatu penelitian hal yang terlebih dahulu harus dilakukan yaitu menentukan permasalahan. Begitu pula dalam laporan magang ini, ada permasalahan yang akan dibahas. Adapun masalah tersebut akan dibahas di bawah ini.

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan PPh Badan 1771 sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana prosedur menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan PPh Badan 1771 sesuai dengan aturan yang ada di PT Maritim Persada Mulia?
3. Bagaimana prosedur menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan PPh Badan 1771 sesuai dengan aturan untuk membandingkan antar prosedur/UU dan implementasi Penghitungan di PT Maritim Persada Mulia?

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Untuk mencapai tujuan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dengan menimbang keterbatasan yang ada, maka pembatasan masalah yang diangkat oleh penulis hanya mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan PPh Badan Klien PT Alim Data Solusindo menggunakan e-SPT.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### ***1.3.1 Tujuan Penulisan***

Adapun penyusunan laporan magang ini juga mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah prosedur menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan PPh Badan 1771 sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah prosedur menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan PPh Badan 1771 sudah sesuai dengan aturan yang ada di PT Maritim Persada Mulia.
3. Untuk mengetahui apakah prosedur menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan PPh Badan 1771 sudah sesuai dengan aturan untuk membandingkan antar prosedur/UU dan implementasi Penghitungan di PT Maritim Persada Mulia.

### ***1.3.2 Manfaat Penulisan***

Disamping tujuan diatas, penyusunan laporan Tugas Akhir ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a) Menjadikan sarana dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan;
  - b) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, keahlian, keterampilan, pengalaman penulis sehingga dapat digunakan untuk persiapan menghadapi dunia kerja khususnya bidang perpajakan;

- c) Meningkatkan keahlian dan penggunaan aplikasi di bidang perpajakan yang diperoleh saat melaksanakan kegiatan magang.
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- a) Sebagai referensi untuk memberikan informasi baru mengenai Tugas Akhir Diploma III Perpajakan pada lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka;
  - b) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
3. Bagi Perusahaan
- a) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
  - b) Membantu perusahaan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Dalam membuat laporan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga mempermudah dalam menyusun laporan ini. Adapun metode penulisan yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif yang diperoleh dari data sekunder. Metode deskriptif merupakan metode

penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

#### 1. Studi Lapangan

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan berupa observasi, partisipasi, wawancara dengan beberapa karyawan dan atasan perusahaan tersebut mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan PPh Badan yang diterapkan oleh perusahaan.

#### 2. Studi Kepustakaan

Studi keputusan yaitu suatu upaya akademis dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan literature-literatur yang relevan dengan masalah yang teliti.

#### 3. Praktek Kerja

Praktek kerja yaitu suatu upaya akademis untuk mendapatkan data laporan tugas akhir dimana penulis ikut terjun langsung ke lapangan.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan data yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, metode ini digunakan untuk mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian khususnya mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan PPh Badan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Setya Luqmana. 2019. Pelaporan SPT PPh Badan Terhadap Perpajakan PT Widya Satria Surabaya. Makalah. Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Jombang.

Elma Sirikit. 2019. Prosedur Pelaporan E-SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Kecantikan Jember. Makalah. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kementrian Keuangan RI. Informasi APBN 2018, 2019, dan 2020.

Neli Nova Andriani. 2018. Prosedur Pengisian dan Pelaporan E-FORM (1770 S dan 1770) melalui E-Filing pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Makalah. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Novi Purnama Sari, Kertahadi, Maria Goretti Wi Endang NP. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, [105030407111034@mail.ub.ac.id](mailto:105030407111034@mail.ub.ac.id))

PT Alim Data Solusindo ([alimdata09@gmail.com](mailto:alimdata09@gmail.com)). (2020, 04 April). Data PT Alim Data Solusindo Keperluan Julia. E-mail kepada Julia Dwi Fitriani ([juliadwi.f31071999@gmail.com](mailto:juliadwi.f31071999@gmail.com))

PT Maritim Persada Mulia ([permatamulia021@gmail.com](mailto:permatamulia021@gmail.com)). (2020, 07 Mei). Data Laporan Keuangan PT Maritim Persada Mulia. E-mail kepada PT Alim Data Solusindo ([alimdata09@gmail.com](mailto:alimdata09@gmail.com))